



Implementation of Civil Servant Control Functions at the Mulak Seframe Subdistrict Office, Lahat Regency

Implementasi Fungsi Pengendalian Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat



Anis Pidia^a
Ike Apriani^b

Article history:

Submitted: 26-11-2023

Revised: 22-12-2023

Accepted: 31-12-2023

Keywords:

Implementation, Employees, District

Abstract

This research was conducted at the Mulak Seframe Subdistrict Office, Lahat Regency. The aim of the research is to analyze how the Civil Servant Control Function is implemented at the Mulak Seframe Subdistrict Office, Lahat Regency. Data sources are primary data and secondary data. The data collection methods in this research are literature study and field study consisting of observation, interviews and documentation. The existing controls at the Mulak Seframe Subdistrict Office, Lahat Regency, have generally been implemented well, such as: 1). Control of activities to be carried out by employees. The process of controlling activities or work programs has been implemented by determining who will carry out the activity and how the activity will be carried out and where the activity will be carried out. 2). Control over the process of determining the limits of what employees will do by determining the expected results. In this control, employees know the limits of what can be done with the aim of getting results as expected. 3). Control in determining direction so that all activities run according to targets. In this control, employees in carrying out their activities have a direction and goals or targets that have been determined by the leadership. 4). Control in determining the organizational structure and division of tasks for each employee. Employees are given tasks in accordance with their main duties and functions.

Keywords: Implementation, Employees, District

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana Implementasi Fungsi Pengendalian Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat. Sumber data yaitu data primier dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan

^a Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

^b Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia

yang terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pengendalian yang ada di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat pada umumnya sudah terlaksana dengan baik seperti : 1). Pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pegawai. Proses pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan atau program kerja sudah dilaksanakan dengan menentukan siapa yang akan mengerjakan kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dan serta dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. 2). Pengendalian terhadap proses penentuan batasan dari apa yang akan dikerjakan oleh pegawai dengan penentuan hasil yang diharapkan. Pada pengendalian ini pegawai mengetahui batasan apa saja yang boleh dikerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 3). Pengendalian dalam penentuan arah agar semua aktivitas yang berjalan sesuai dengan sasaran. Pada pengendalian ini pegawai dalam menjalankan aktivitasnya memiliki arah serta tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh pimpinan. 4). Pengendalian dalam penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas masing – masing pegawai. Pegawai diberikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kata kunci: Implementasi, Pegawai, Kecamatan

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2023.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Anis Pidia

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email address: anispidia475@gmail.com

1. Pendahuluan

Kantor Camat sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan publik, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, maka dalam hal ini yang memiliki peran sangat penting yaitu pegawai. Terlaksana atau tidaknya pelayanan publik yang baik tergantung pada pegawainya, maksimal atau tidaknya pelayanan yang diberikan sangat ditentukan oleh pencapaian – pencapaian yang dilakukan oleh pegawai, maka dari itu Kantor Camat harus bisa melaksanakan fungsi implementasi pengendalian guna mewujudkan tujuan, program kerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (Purnawan et al., 2022)

Sebagai organisasi pemerintahan dalam mewujudkan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan program kerja keberadaan tenaga kerja tentu menjadi modal dasar organisasi (Triyanto et al., 2021), maka dalam hal ini pegawai memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan – tujuan yang telah direncanakan oleh Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat. Pencapaian hasil kerja pegawai didalam organisasi sangat menentukan pencapaian tujuan – tujuan organisasi, dalam mencapai tujuan melalui aktivitas pegawai tentunya akan melibatkan pimpinan secara langsung dengan implementasi fungsi pengendalian.

Organisasi dengan kekuatan dasar melalui manusia atau tenaga kerja dalam mengelola melalui tanggungjawab terhadap pelaksanaan tujuan dan program kerja organisasi (Wasistiono, 2009). Apa yang dikelola dan diatur dengan unsur – unsur yang ada didalam organisasi, maka kegiatan pengelolaan tersebut disebut manajemen. Setiap organisasi, apalagi suatu instansi pemerintahan manajemen sumber daya manusia menjadi modal inti dibandingkan dengan modal yang lainnya. Dalam mewujudkan tujuan instansi melalui penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia, tentu akan memudahkan dalam pengontrolan dalam pelaksanaan – pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan – tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan suatu instansi, penerapan fungsi manajemen menjadi ukuran dan alat dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian – pencapaian yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Biasanya pencapaian organisasi sangat bergantung pada efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan tugas – tugasnya. (Purnawan, 2021)

Menurut Terry dalam (Purnawan, 2014), terdapat beberapa fungsi manajemen dalam sebuah organisasi, fungsi manajemen pertama : Perencanaan (Planning). Perencanaan disini yaitu penyusunan program – program kerja organisasi, penentuan mekanisme kerja dan pelaksanaan kegiatan. Fungsi manajemen kedua : Pengorganisasi (Organizing). Pengorganisasian disini berarti membagi dan mengelompokkan kelompok kerjascara struktural. Fungsi manajemen ketiga : Menggerakkan (Actuating). Menggerakkan disini memiliki makna melakukan pelaksanaan kegiatan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Fungsi manajemen ke empat : Pengendalian (Controlling). Pengendalian disini berarti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengendalian. Jika sebuah organisasi benar – benar melakukan penerapan fungsi – fungsi

manajemen tersebut besar kemungkinan efektivitas kerja pegawai yang ada didalam organisasi tersebut senantiasa akan menjadi maksimal. Dengan efektivitas kerja pegawai yang maksimal maka akan memudahkan organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan yang telah direncanakan. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Purnawan, 2020).

Implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian yang merancang implmentasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa Implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan (Aprianty et al., 2022). Penerapan fungsi manajemen dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan fungsi manajemen yaitu pengendalian (Controlling). Pengendalian disini berarti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Alasan penulis memilih fungsi manajemen yaitu pengendalian agar penelitian ini lebih fokus pada satu pokok permasalahan yang ada pada objek penelitian dan supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih spesifik pada satu permasalahan.

Pengendalian dilakukan tidak hanya untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi pengendalian juga bertujuan mengarahkan suatu kegiatan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Jika pengendalian sudah dilakukan dengan sebenar – benarnya maka akan memungkinan efektivitas kerja pegawai dalam menajalankan tugas akan menjadi maksimal, sehingga apa yang menajdi tujuan organisasi dimungkinkan akan tercapai. Penerapan fungsi manajemen yaitu dalam hal ini pengendalian di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat belum terlaksana dengan baik, dilihat dari pengendalian dalam mengukur kinerja belum dilaksanakan dan pengendalian mengenai membandingkan kinerja pegawai dengan standar jarang dilakukan. Sehingga dengan adanya beberapa permasalahan ini berpenagruh terhadap pencapaian hasil kerja pegawai dalam menjalankan fungsi – fungsinya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis yang dilakukan di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, ditemui beberapa masalah yaitu pencapaian hasil kerja pegawai Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat masih rendah, hal ini disebabkan karena perencanaan dalam menyusun program kegiatan kerja belum terlaksana dengan maksimal, kegiatan dalam pembagian tugas atau kegiatan lain kepada pegawai sering tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan masih adanya program kegiatan yang belum terealisasi dengan baik. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Pengendalian Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat”. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

menganalisis bagaimana Implementasi Fungsi Pengendalian Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat

a. Implementasi

Menurut (Winarno, 2014) pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Nugroho, 2011), berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Mazmanian and Sabatier dalam (K. & Lituhayu, 2017). Pengertian Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan. Adapun beberapa tujuan implementasi antara lain yakni:

- 1) Mampu melaksanakan agenda yang sudah disusun dengan akurat dan cermat baik itu individu ataupun kelompok.
- 2) Dapat menguji dan mendokumentasikan suatu kebijakan didalam pelaksanaan rencana atau juga kebijaksanaan.
- 3) Untuk dapat melaksanakan tujuan yang akan diraih dalam pra-rencana atau kebijakan yang sudah dirancang.
- 4) Dapat mengetahui keahlian masyarakat untuk melaksanakan suatu kebijakan ataupun rencana yang sesuai dengan apa yang rencanakan.
- 5) Mampu mengetahui fase keberhasilan suatu kebijakan atau konsep yang sudah dirancang untuk meningkatkan mutu.

b. Pengendalian

Menurut (Noviyanto & Purnawan, 2022), pengendalian adalah proses kegiatan melakukan pengamatan terhadap seluruh kegiatan dengan tujuan agar apa yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian merupakan proses penentuan batasan dari apa yang akan dikerjakan dengan bagaimana hasilnya yang diharapkan nanti. Pengendalian dilakukan untuk menentukan arah agar semua aktivitas yang berjalan sesuai dengan sasaran dan meminimaliser kesalahan dan penyimpangan. Menurut Siagian dalam (Rusmiati, 2017), pengendalian adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan sebelumnya. Pengendalian dilakukan tidak hanya untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan, akan tetapi pengendalian juga bertujuan mengarahkan suatu kegiatan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Jika pengendalian sudah dilakukan dengan sebenar – benarnya maka

akan memungkinan efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan tugas akan menjadi maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dimungkinan akan tercapai. Berikut ini ada beberapa fungsi pengendalian (controlling), menurut (Adri et al., 2021) yaitu :

- 1) Memberikan penilaian dan pengukuran terhadap pencapaian yang telah dilakukan
- 2) Melakukan koreksi terhadap penyimpangan - penyimpangan
- 3) Mengambil sosisi terhadap masalah dari pencapaian
- 4) Meningkatkan tanggungjawab atas pemberian wewenang
- 5) Memberikan didikan atau pembimbingan agar para anggota bekerja sesuai prosedur.

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Arikunto Suharsimi, 2010) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dan informasi mengenai suatu gejala yang ada pada objek penelitian, dengan demikian penulis mencatat, melakukan penganalisaan dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan permasalahan – permasalahan yang ada yang terjadi pada objek penelitian, permasalahan ini bisa berupa karakteristik perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara permasalahan dengan permasalahan yang lainnya.

Menurut Sugiyono dalam (Kurniawan et al., 2023), metode pengumpulan data adalah cara bagaimana memperoleh data mengenai pokok permasalahan yang teliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Pustaka (Library Reseach). Studi pustaka yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan (Field Reseach). Studi lapangan merupakan tehnik pengumpulan data secara langsung, dengan tujuan memperoleh data resmi dan akurat serta relevan dengan masalah–masalah yang diteliti dengan :
 - 1) Pengamatan (Observasi). Pengamatan yaitu proses pencatatan pola perilaku objek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi terhadap individu – individu yang diteliti.
 - 2) Wawancara (Interview). Wawancara ini berupa proses percakapan berbentuk Tanya jawab langsung bertatap muka dengan informan untuk memperoleh data dan keterangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (interview), dengan menggunakan bantuan interview guide (pedoman wawancara) agar proses komunikasi dan interaksi mengumpulkan data dapat terarah.

- 3) Dokumentasi. Dalam hal ini penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan data menganalisa masalah – masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pengendalian Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Pengendalian yang dilakukan di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat dilaksanakan dengan cara melalui proses pengamatan oleh unsur pimpinan terhadap seluruh kegiatan dengan tujuan agar apa yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekretaris, menambahkan “Pengendalian terhadap penyiapan bahan dalam penyusunan program kerja, penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pegawai sudah berjalan dengan baik, dimana dalam hal ini pimpinan memberikan arahan kepada pegawai agar melakukan koordinasi kepada bidang masing – masing dan setelah itu melakukan koordinasi kepada sekretaris dan kepada dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Kepegawaian Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Pengendalian yang dilakukan di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat dengan proses penentuan batasan dari apa yang akan dikerjakan oleh pegawai dengan bagaimana hasilnya yang diharapkan nanti. Kasubag Kepegawaian Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menambahkan “ Pimpinan memberikan arahan kepada pegawai, agar Kasubag Umum dan Kepegawaian menyusun dan mengurus administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Program Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Pengendalian dilakukan untuk menentukan arah agar semua aktivitas yang berjalan sesuai dengan sasaran dan meminimaliser kesalahan dan penyimpangan, sehingga apa yang telah dikerjakan dan ditargetkan bisa tercapai sesuai dengan penentuan target yang telah direncanakan. Kasubag Program Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menambahkan penjelasan “ Kasubag Program mendapatkan perintah dari kepala Camat agar melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil capaian program kerja dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil dan mengurangi kesalahan dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Kasi Pemerintahan dimintah oleh Camat agar melaporkan pelaksanaan di program kerja, kegiatan dan sarana prasarana Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Pengendalian di

Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat adalah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dalam tujuan melayani masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Ekonomi Pembangunan Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Penetapan struktur organisasi dilakukan setelah diadakan rapat pemilihan dan pembagian tugas dan rapat tersebut diadakan pada awal tahun. Pemilihan dan pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan personal pegawai dalam mengelola kondisi pencapaian tujuan, program kerja, visi dan misi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan : Pengendalian yang ada di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat pada umumnya sudah terlaksana dengan baik seperti :

- a. Pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pegawai. Proses pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan atau program kerja sudah dilaksanakan dengan menentukan siapa yang akan mengerjakan kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dan serta dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
- b. Pengendalian terhadap proses penentuan batasan dari apa yang akan dikerjakan oleh pegawai dengan penentuan hasil yang diharapkan. Pada pengendalian ini pegawai mengetahui batasan apa saja yang boleh dikerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Pengendalian dalam penentuan arah agar semua aktivitas yang berjalan sesuai dengan sasaran. Pada pengendalian ini pegawai dalam menjalankan aktivitasnya memiliki arah serta tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh pimpinan.
- d. Pengendalian dalam penetapan struktur organisasi dan pembagian tugas masing – masing pegawai. Pegawai diberikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akan tetapi dalam pengendalian yang ada di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, ditemui beberapa masalah berkaitan masih kurangnya pengendalian yaitu :

- a. Pengendalian terhadap jumlah pencapaian hasil kerja pegawai. Jumlah pencapaian hasil kerja pegawai dalam menjalankan aktivitasnya sering kali tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Pengendalian terhadap standar pencapaian hasil. Belum terealisasinya standar capaian hasil kerja pegawai.
- c. Pengendalian terhadap program kegiatan yang belum terealisasi. Program kegiatan yang belum terealisasi tidak mendapatkan solusi atas pemecahan dan penyelesaian program tersebut.

Tahapan Proses Pengendalian Pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, menjelaskan, ada beberapa tahapan proses pengendalian pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat :

- a. Penentuan nilai atau standar pengendalian di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat
- b. Melakukan pengukuran atas pelaksanaan kegiatan dan program – program kegiatan Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat
- c. Melakukan perbandingan hasil dengan target yang diharapkan yang telah ditentukan di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat
- d. Melakukan proses perbaikan atas terjadinya penyimpangan – penyimpangan.

Hambatan Dalam Proses Pengendalian Pada Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat

Ada beberapa hambatan yang dihadapi Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat ada beberapa hambatan yaitu :

- a. Belum adanya pengukuran terhadap pencapaian yang telah dilakukan
- b. Belum dilakukan koreksi terhadap penyimpangan - penyimpangan
- c. Belum adanya sosuli terhadap masalah dari pencapaian
- d. Pemberian wewenang yang tidak efektif dalam meningkatkan tanggungjawab
- e. Belum adanya didikan atau pembimbingan agar para anggota bekerja sesuai prosedur.

Dari beberapa kendala yang dihadapi Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, hal ini berdampak pada belum maksimalnya efektivitas dan efisiensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sehingga apa yang menjadi program dan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dituliskan kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pengendalian yang ada di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pegawai. Proses pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan atau program kerja sudah dilaksanakan dengan menentukan siapa yang akan mengerjakan kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dan serta dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

- b. Dalam pengendalian yang ada di Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, ditemui beberapa masalah berkaitan masih kurangnya pengendalian yaitu : Pengendalian terhadap jumlah pencapaian hasil kerja pegawai. Jumlah pencapaian hasil kerja pegawai dalam menjalankan aktivitasnya sering kali tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Pengendalian terhadap standar pencapaian hasil. Belum terealisasinya standar capaian hasil kerja pegawai. Pengendalian terhadap program kegiatan yang belum terealisasi. Program kegiatan yang belum terealisasi tidak mendapatkan solusi atas pemecahan dan penyelesaian program tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dituliskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pimpinan Kantor Camat Mulak Sebingkai Kabupaten Lahat, hendaknya terus berusaha untuk melakukan pengendalian terhadap pencapaian hasil kerja pegawai agar sesuai dengan pencapaian target kerja sebagaimana mestinya.
- b. Pengendalian terhadap standar pencapaian hasil harus terstruktur dan dilaksanakan secara terus menerus
- c. Pengendalian terhadap program kegiatan yang belum terealisasi, hendaknya menghasilkan solusi untuk pencapaian program – program dimasa yang akan datang.

5. Daftar Pustaka

- Adri, F. M., Giatman, M., & Ernawati, E. (2021). Manajemen pembelajaran pada masa pandemi covid-19 berbasis blended learning. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 110. <https://doi.org/10.29210/3003875000>
- Aprianty, H., Marianto, D., Sutardi, D., Rahiman Dani, & Purnawan, H. (2022). Analysis Of Policy Implementation Of The Service Of Youth And Sports In An Effort To Increasing Athletes Achievement In Bengkulu Province. *Journal of Social Science and Humanities*, 1(2). <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/article/view/122%0Ahttps://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/JoSSH/article/download/122/106>
- Arikunto Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipt.
- K., N. A., & Lituhayu, D. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 27–39. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16539>
- Kurniawan, V. D., Mulyadi, Purnawan, H., Prabawati, I., & Harmiati. (2023). Evaluasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1).
- Noviyanto, H., & Purnawan, H. (2022). *Analysis of the Performance of the North Bengkulu Regency DPRD in Collecting Community Aspirations During the Recess of Commission I for the 2020 Second Session Period Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat Pa*. 3(2), 1–13.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 9(1), 35–55.
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Purnawan, H., Noviyanto, H., & Tauran. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(2), 229–237.
- Rusmiati, E. T. (2017). ANALISIS SISTEM PELAYANAN E-KTP DI KELURAHAN PORIS GAGA TANGERANG. *Public Administration Journal*, 1(2), 174–189.
- Triyanto, D., Purnawan, H., Saputra, B., Padang, U. N., Governance, G., Publik, P., Bengkulu, K., Governance, G.,

Service, P., & City, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu Application of Good Governance Principles in Public Services At the Betungan Community Health Center , Bengkulu City. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*.

Wasistiono, S. dkk. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Fokusmedia.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus* (T. Admojo (ed.); 2nd ed.). CAPS.